

Mantan Legislator Ini Minta Disumpah, Penyidik KPK Tertawa



Raudin Purba saat di Markas Brimob Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Kamis (17/9). (Foto:LintasMedan/Irma)

Medan, 17/9 (LintasMedan) – Mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Raudin Purba salah seorang yang menjalani pemeriksaan penyidik KPK, di Markas Komando Brimob, Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Kamis.

Kepada wartawan, saat jeda untuk Sholat Ashar, dia mengaku menjawab pertanyaan penyidik tanpa beban dan rasa takut.

“Saya ditanya pertanyaan yang saya tidak tahu, ya kujawab tidak tahu,” kata Raudin.

Bahkan cerita Raudin, di hadapan penyidik dia meminta supaya disumpah. “Dengan cara apapun disumpah saya siap, penyidik KPK

malah tertawa,” ujarnya lagi.

Sikap Raudin, berbeda dengan sejumlah mantan anggota DPRD Sumut lainnya yang langsung ‘ngacir’ bahkan terkesan sembunyi dari kejaran pers yang menunggu proses pemeriksaan di luar gedung.

Seperti tanpa beban dia langsung menjawab apa yang dialaminya dalam proses pemeriksaan tersebut.

Menurut Raudin, dia ditanya apa ada menerima uang sejumlah Rp350 Juta pada bulan Juni. “Saya jawab tidak ada,” ujarnya.

Namun, dia sangat terkejut ketika penyidik KPK menyerahkan lembaran yang menerakan namanya ada menerima dana sebesar Rp50 Juta.

Nama Raudin tertera di urutan pertama lembaran ke dua, berkas yang disodorkan penyidik KPK.

Mantan guru ini mengaku tak pernah menerima uang tersebut, bahkan juga tak tahu untuk apa dana itu. “Nggak tahu untuk apa dana itu, tapi tak ada kuterima walaupun namaku ada disitu,” katanya.

Hari keempat pemeriksaan KPK terhadap anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, terlihat sejumlah mantan wakil rakyat keluar dengan tergesa-gesa dari gedung Brimob usai dimintai keterangan, di antaranya Kamaluddin Harahap (PAN), Zulkifli Husin (PAN), Hamamisul Bahsan (Hanura), Musdalifah (Hanura), (Fasiruddin Daulay (PKB), Sigit P Asri (PKS), Restu Kurnia Sarumaha (PPRN), M Nasir (PKS), Nurazizah Tambunan (PKS), serta M Taufik (PKS).

Sejumlah mantan legislator itu diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan/atau pemberian uang/barang/sesuatu yang dilakukan oleh Gubernur Sumut tahun anggaran 2013-2015, serta batalnya beberapa kali penggunaan hak interpelasi terhadap

Gatot Pujo Nugroho.

Selain mantan legislator, juga diperiksa anggota DPRD Sumut periode 2015-2019 Ikrimah Hamidi (PKS) serta beberapa SKPD yakni Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumut, Edy Salim dan Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumut, Sulaiman Hasibuan.

“Saya kesini hanya disuruh mengantar berkas,” ujar Sulaiman saat dicecar wartawan.(LMC-02)